

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 94 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ditetapkannya Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional oleh Instansi Pembina, diperlukan penyesuaian terhadap Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Kelas Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibayarkan dihitung sejak pejabat/pegawai diangkat ke dalam jabatan tersebut.

- KETIGA : Kelas Jabatan untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan/atau sampai dengan adanya mutasi pejabat fungsional.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.  
NOMOR : 94 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26 April 2021

DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)
<b>A</b>	<b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>	
1	Sekretaris Utama	16
2	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
3	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
4	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum	15
5	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	16
6	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	15
7	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	15
8	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	15
9	Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	16
10	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	15
11	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	15
12	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	15
13	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	16
14	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	15
15	Direktur Sertifikasi Profesi	15
16	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	16
17	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	15
18	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	15
19	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	15
20	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	15
21	Inspektur	15

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
<b>B</b>	<b>Jabatan Administrasi</b>	
	<b>Jabatan Administrator</b>	
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12
2	Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga	12
	<b>Jabatan Pengawas</b>	
1	Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga	9
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
	<b>Jabatan Pelaksana</b>	
1	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
2	Analisis Barang Milik Negara	7
3	Analisis Berkas Sengketa	7
4	Analisis Data dan Informasi	7
5	Analisis Diklat	7
6	Analisis Hukum	7
7	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	7
8	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7
9	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
10	Analisis Kerjasama Diklat	7
11	Analisis Kinerja	7
12	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
13	Analisis Organisasi	7
14	Analisis Pengembangan Kinerja	7
15	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
16	Analisis Perencanaan	7
17	Analisis Perencanaan Anggaran	7
18	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
19	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	7
20	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
21	Analisis Permasalahan Hukum	7
22	Analisis Protokol	7
23	Analisis Satuan Pengawas Internal	7
24	Analisis Sistem Informasi	7
25	Analisis Tata Laksana	7
26	Analisis Tata Usaha	7
27	Bendahara	7
28	Penata Kendaraan Dinas	7
29	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
30	Penelaah Pengembangan Usaha	7
31	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
32	Perancang Naskah Soal	7
33	Ajudan	6
34	Pengadministrasi Perlengkapan	6
35	Pengelola Administrasi dan Verifikasi	6
36	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	6
37	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	6
38	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6
39	Pengelola Data Monitoring Berkas Sengketa	6

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
40	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6
41	Pengelola Keuangan	6
42	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
43	Pengelola Sertifikasi	6
44	Pengelola Situs/Web	6
45	Pengelola Teknologi Informasi	6
46	Pranata Barang dan Jasa	6
47	Sekretaris	6
48	Teknisi Uji Kompetensi	6
49	Verifikator Anggaran	6
50	Pengadministrasi Keuangan	5
<b>C</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	
1	Analisis Hukum Utama	13
2	Analisis Hukum Madya	11
3	Analisis Hukum Muda	9
4	Analisis Hukum Pertama	8
5	Analisis Kebijakan Utama	14
6	Analisis Kebijakan Madya	12
7	Analisis Kebijakan Madya*	12
8	Analisis Kebijakan Muda	10
9	Analisis Kebijakan Muda*	9
10	Analisis Kebijakan Pertama	8
11	Analisis Kepegawaian Madya	11
12	Analisis Kepegawaian Madya*	12
13	Analisis Kepegawaian Muda	9
14	Analisis Kepegawaian Muda*	9
15	Analisis Kepegawaian Pertama	8
16	Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya	12
17	Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya*	12
18	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	10
19	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda*	9
20	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	8
21	Analisis SDM Aparatur Utama	14
22	Analisis SDM Aparatur Madya	12
23	Analisis SDM Aparatur Muda	10
24	Analisis SDM Aparatur Pertama	8
25	Arsiparis Utama	13
26	Arsiparis Madya	11
27	Arsiparis Muda	9
28	Arsiparis Muda*	9
29	Arsiparis Pertama	8
30	Arsiparis Penyelia	8
31	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
32	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6
33	Assessor SDM Aparatur Utama	14
34	Assessor SDM Aparatur Madya	12
35	Assessor SDM Aparatur Madya*	12

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
36	Assessor SDM Aparatur Muda	10
37	Assessor SDM Aparatur Muda*	9
38	Assessor SDM Aparatur Pertama	8
39	Auditor Utama	13
40	Auditor Madya	11
41	Auditor Muda	9
42	Auditor Pertama	8
43	Penata Laksana Barang Penyelia	9
44	Penata Laksana Barang Mahir	8
45	Penata Laksana Barang Terampil	7
46	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12
47	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10
48	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8
49	Pengembang Teknologi Pembelajaran Utama	14
50	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	12
51	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
52	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8
53	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	15
54	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	13
55	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya*	12
56	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	11
57	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda*	9
58	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	9
59	Perencana Utama	14
60	Perencana Madya	12
61	Perencana Madya*	12
62	Perencana Muda	10
63	Perencana Muda*	9
64	Perencana Pertama	9
65	Pranata Humas Utama	13
66	Pranata Humas Madya	11
67	Pranata Humas Muda	9
68	Pranata Humas Muda*	9
69	Pranata Humas Pertama	8
70	Pranata Keuangan APBN Penyelia	8
71	Pranata Keuangan APBN Mahir	7
72	Pranata Keuangan APBN Terampil	6
73	Pranata Komputer Utama	13
74	Pranata Komputer Madya	11
75	Pranata Komputer Madya*	12
76	Pranata Komputer Muda	9
77	Pranata Komputer Muda*	9
78	Pranata Komputer Pertama	8
79	Pranata Komputer Penyelia	8
80	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
81	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
82	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
83	Pustakawan Pertama	8

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
84	Sandiman Utama	14
85	Sandiman Madya	12
86	Sandiman Muda	10
87	Sandiman Pertama	8
88	Statistisi Utama	13
89	Statistisi Madya	11
90	Statistisi Muda	9
91	Statistisi Pertama	8
92	Widyaiswara Utama	13
93	Widyaiswara Madya	11
94	Widyaiswara Madya*	12
95	Widyaiswara Muda	9
96	Widyaiswara Muda*	9
97	Widyaiswara Pertama	8
98	Manggala Informatika Muda*	9

Keterangan :

- \* Kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional yang merupakan hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO